

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN BEKASI

ANALYSIS OF INCOME LEVEL IN BEKASI DISTRICT

¹⁾Fazen Hesi Araja, ²⁾Hadi Sasana, ³⁾Gentur Jalunggono
¹⁾Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
fazenhesaraja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis besaran tingkat ketimpangan pendapatan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi ketimpangan tersebut. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen atau catatan yang menjadi bahan penelitian yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa cross section 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi dan time series selama kurun waktu 8 tahun terdiri dari tahun 2010-2017. Penelitian ini menggunakan alat Indeks Entrophy Theil dan analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Entrophy Theil Di Kabupaten Bekasi sepanjang 2010-2017 ini masih cukup timpang dengan rata-rata sebesar 0,84. Berdasarkan ketiga variabel tersebut yaitu indeks pembangunan manusia, inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini secara parsial berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan secara bersama sama indeks pembangunan manusia, inflasi, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan

Kata Kunci: Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan

Abstract

This study aims to analyze the magnitude of income inequality and find out the factors that influence such inequality. The data used in the form of secondary data obtained by collecting documents or records that are used as research material from the Central Statistics Agency (BPS). This research is a quantitative research. The data used in the form of cross section 23 Districts in Bekasi Regency and time series over a period of 8 years consisted of the years 2010-2017. This study uses the Therop Entrophy Index tool and panel data regression analysis using the Fixed Effect Model. The results of data analysis showed that the average Entrophy Theil Index in Bekasi Regency during 2010-2017 was still quite lame with an average of 0.84. Based on the three variables, namely the Human Development Index, Inflation and Economic Growth partially positive effect on income inequality while the level of poverty does not affect income inequality. Meanwhile, together with the Human Development Index, Inflation, Poverty Rate and Economic Growth affect the income inequality.

Keywords: Inflation, Human Development Index, Economic Growth, Poverty Level, and Income Inequality

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan masalah yang berbeda dari masalah pendapatan distribusi pendapatan. Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna (absolute equality) maka tiap orang akan menerima pendapatan yang sama besar. Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan.

Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Tambunan (2001:72) Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Salah satu kabupaten yang diduga terdapat ketimpangan antar kecamatan tinggi di daerah Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi sebagai kawasan yang dekat dengan DKI Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga muncul berbagai kawasan industri. namun terpusatnya industri di Kabupaten Bekasi sebanyak 6 kecamatan menjadikan tingginya ketimpangan pendapatan dengan wilayah lain.

Berdasarkan nilai Indeks Gini dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Bekasi secara umum selama 2010-2017 dapat

dikategorikan kedalam tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan angka rata-rata Indeks Gini sebesar 0,328, angka ini dibawah angka rata-rata Indeks Gini Provinsi Jawa Barat sebesar 0,404 dan angka rata-rata Indeks Gini Nasional sebesar 0,402.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031 bahwa wilayah pembangunan Kabupaten Bekasi dibagi menjadi 4 wilayah yaitu:

1. Wilayah Pembangunan (WP) I yang meliputi Kecamatan : Cabangbungin, Tambelang, Sukakarya, Sukawangi, Pebayuran, Sukatani, Karangbahagia dan Kedungwaringin.
2. Wilayah Pembangunan (WP) II yang meliputi Kecamatan : Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Timur,
3. Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara. Wilayah Pembangunan (WP) III yang meliputi Kecamatan : Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cibarusah dan Bojongmangu.
4. Wilayah Pembangunan (WP) IV yang meliputi Kecamatan : Babelan, Tambun Utara, Tarumajaya dan Muaragembong. Sepanjang tahun 2010 -2017, Nilai Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bekasi tertinggi

pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,79% sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,59%. Sedangkan berdasarkan wilayah pembangunan menunjukkan bahwa Nilai Laju Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Pembangunan I Kabupaten Bekasi tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,23% sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,02%. Sedangkan di Wilayah Pembangunan II Kabupaten Bekasi, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,32% sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar -3,49%. Sementara di Wilayah Pembangunan III Kabupaten Bekasi, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,41% sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,45% dan di Wilayah Pembangunan IV Kabupaten Bekasi, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,62% sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,38%.

Sedangkan Nilai Laju PDRB Per Kapita

Kabupaten Bekasi sepanjang tahun 2010-2017 memiliki nilai tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,34% sedangkan Laju PDRB Per Kapita terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar - 1,25%. Sedangkan berdasarkan wilayah pembangunan menunjukkan bahwa Nilai Laju PDRB Per Kapita di Wilayah Pembangunan I Kabupaten Bekasi tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar -1,10% sedangkan Laju PDRB Per Kapita terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar - 6,51%. Sedangkan di Wilayah Pembangunan II Kabupaten Bekasi, Laju PDRB Per Kapita tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,68%. sedangkan Laju PDRB Per Kapita terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar -2,63% Sementara di Wilayah Pembangunan III Kabupaten Bekasi, Laju PDRB Per Kapita tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,41% sedangkan Laju PDRB Per Kapita terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar -2,32% dan di Wilayah Pembangunan IV Kabupaten Bekasi, Laju PDRB Per Kapita tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,80% sedangkan Laju PDRB Per Kapita terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar -6,47%.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi 2010-2017

| Keterangan/Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IPM | 67.58 | 68.66 | 69.38 | 70.09 | 70.51 | 71.19 | 71.83 | 72.63 |
| Inflasi (%) | 7,88 | 3,45 | 3,46 | 9,46 | 7,68 | 2,22 | 2,37 | 2,46 |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | | 6,60 | 6,53 | 6,23 | 5,88 | 4,46 | 4,99 | 5,78 |
| Tingkat kemiskinan (%) | 6,11 | 5,90 | 5,25 | 5,20 | 4,88 | 5,27 | 4,92 | 4,73 |

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi 2010-2017

Berdasarkan sejumlah uraian latar belakang di atas, Maka penelitian ini akan menganalisa seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan tiap kecamatan di Kabupaten Bekasi, lalu dibandingkan tiap kecamatan dan dicari Penyebab ketimpangan yang terjadi di tiap kecamatan.

LANDASAN TEORI

Distribusi Pendapatan

Adanya heterogenitas dan beragamnya karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Kesenjangan/ketimpangan daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri (Kuncoro 2004: 133).

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan tingkat harga. Inflasi menjadi salah satu fenomena moneter yang menjadi perhatian utama para ekonom dan pembuat kebijakan (Mankiw, 2000:194).

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, tidak hanya dari pertumbuhan ekonominya (Human Development Report, 1995:103), Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tarigan (2004:27) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut.

Kemiskinan

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Suryawati, 2005 : 1) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (poverty), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat

(state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini terkait dengan ketimpangan dalam pendapatan ekonomi tiap kecamatan di Kabupaten Bekasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dimana data ini menggunakan data time series selama 8 tahun dan data cross section dari 23 kecamatan.

Variabel Penelitian

- a) Ketimpangan Pendapatan (Y) adalah perbedaan pendapatan pada suatu daerah dengan daerah lain yang berada dalam wilayah tertentu. Satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah angka Indeks Entropy Theil.
- b) Indeks pembangunan manusia (IPM) (X1) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal yang mendasar pembangunan manusia, yaitu: (1) Indeks Harapan Hidup yang diukur dengan angka harapan ketika lahir, (2) Indeks Pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan melek huruf, (3) Indeks Pendapatan yang diukur dengan daya beli konsumsi per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam penelitian ini adalah Nilai

IPM menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2010-2017.

- c) Inflasi (X2) adalah Kenaikan terus menerus dalam rata-rata tingkat harga yang dihitung dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Nilai Inflasi yang digunakan yaitu Inflasi Tahunan di Kabupaten Bekasi dari tahun 2010-2017. Satuan yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah persentase.
- d) Pertumbuhan ekonomi (X3) adalah laju kenaikan nilai PDRB riil pada tiap tahun yang terjadi antar Kecamatan di Kabupaten Bekasi dari tahun 2010-2017. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase.
- e) Tingkat kemiskinan (X4) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bekasi dari tahun 2010-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini digolongkan kedalam data sekunder, dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data variabel independen dan dependen diperoleh pada data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik Analisis Data

Indeks Entropy Theil

Penggunaan Indeks Entropy Theil lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Nilai Indeks Entrophy Theil yang lebih rendah berarti menunjukkan adanya kesenjangan yang rendah, dan sebaliknya.

(Kuncoro, 2004 : 134) adapun formulasi Indeks Entrophy Theil nya yaitu:

$$I_{theil} = \sum(y_i Y) \cdot \text{Log}\left\{\frac{y_i Y}{n_i N}\right\}$$

Dimana:

I Theil = Indeks Entrophy Theil

y_i = PDRB perkapita di kecamatan i

Y = PDRB perkapita kabupaten

n_i = jumlah penduduk kecamatan i

N = jumlah penduduk kabupaten

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik dilakukan, hanya pada uji multikolenieritas dan heteroskedastisitas (Agus dan Basuki, 2015 : 218).

Analisis Regresi Data Panel

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015: 136), dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Menurut Basuki dan Prawoto (2017:227) pemilihan model estimasi ini dilakukan dengan cara Uji Chow dan Uji Hausman, Setelah memilih model yang akan dalam penelitian tersebut maka langsung mengestimasi data panel menggunakan OLS, adapun persamaannya sebagai berikut

$$(y) = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + \beta_4 x_{4it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

$I_{theil}(y)$ = Indeks Entrophy Theil
 β_0 = Intersep

x_{1it} =Indeks Pembangunan manusia

x_{2it} = Inflasi

x_{3it} =Pertumbuhan Ekonomi

x_{4it} =Tingkat Kemiskinan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Parameter Variabel

μ_{it} = *error term*

Hasil Penelitian

Indeks Entrophy Theil

Analisis Indeks Entrophy Theil menggunakan data PDRB Harga Konstan per kapita dan jumlah penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu delapan tahun yaitu dari tahun 2010-2017, dengan nilai ketimpangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks Entrophy Theil tiap kecamatan di Kabupaten Bekasi tahun 2010-2017

| Kecamatan | Tahun | | | | | | | |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Setu | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| Serang Baru | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Cikarang Pusat | 0,69 | 0,65 | 0,68 | 0,64 | 0,57 | 0,39 | 0,28 | 0,22 |
| Cikarang Selatan | 1,77 | 1,68 | 1,71 | 1,58 | 1,53 | 1,22 | 0,95 | 0,72 |
| Cibarusah | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,20 |
| Bojongmangu | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,35 |
| Cikarang Timur | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,74 |
| Kedungwaringin | 0,67 | 0,57 | 0,49 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,61 |
| Cikarang Utara | 1,17 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 1,21 | 1,32 | 1,40 | 1,47 |
| Karangbahagia | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 |
| Cibitung | 1,60 | 1,42 | 1,37 | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 1,31 |
| Cikarang Barat | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,38 | 1,42 | 1,46 |
| Tambun Selatan | 0,91 | 0,93 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,21 | 1,35 | 1,42 |
| Tambun Utara | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Babelan | 0,37 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
| Tarumajaya | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Tambelang | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,61 |
| Sukawangi | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,23 |
| Sukatani | 0,35 | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,39 | 0,46 | 0,49 |
| Sukakarya | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,32 |
| Pebayuran | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,25 |
| Cabangbungin | 0,43 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,38 |
| Muaragembong | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| Kabupaten Bekasi | 0,82 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

Sumber : Diolah Dengan Microsoft Excel 2013

Berdasarkan hasil perhitungan diatas rata-rata Indeks Entrophy Theil Di

Kabupaten Bekasi sepanjang 2010-2017 sebesar 0,84 dimana ketimpangan pendapatan tertinggi di tahun 2012 sebesar 0,87 dan terendah terjadi di tahun 2010 dan 2015 hingga 2017 sebesar 0,82. Sedangkan daerah yang mengalami ketimpangan tertinggi berada di daerah Cikarang Selatan dengan rata-rata sebesar 1,40 dimana ketimpangan pendapatan tertinggi di tahun 2010 sebesar 1,77 dan terendah terjadi di tahun 2017 sebesar 0,72. Sedangkan daerah yang mengalami ketimpangan terendah berada di daerah Tambun Utara dengan rata-rata sebesar 0,05 dimana ketimpangan pendapatan tertinggi di tahun 2010 sebesar 0,09 dan terendah terjadi di tahun 2017 sebesar 0,02.

Penentuan Estimasi Model

Uji Chow

Hasil uji chow yang merupakan perbandingan antara model *common effect* dan *fixed effect* dapat dilihat dari hasil analisis Redunant Fixed Effect-LR. Berdasarkan uji chow yang dilakukan Hasil analisis menunjukkan nilai Prob. F sebesar 0,00. Dikarenakan nilai Prob.F < 0,05 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak maka estimasi model yang lebih tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

Uji Hausman

Metode berikutnya yang digunakan adalah Hausman test. Uji ini dilakukan untuk menentukan model yang lebih tepat

digunakan antara model *fixed effect* dan *random effect*. Berdasarkan uji hausman yang dilakukan Hasil analisis menunjukkan nilai Prob. Cross section random sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak yang artinya model yang lebih tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisis model ini menggunakan alat bantu program komputer Eviews 9. Hasil estimasi model diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Data Panel

| Variabel | Koefisien | Std. Error | t-Statistik | Prob. |
|----------|-----------|------------|-------------|--------|
| C | -5.138758 | 0.836009 | -6.146772 | 0.0000 |
| X1 | 0.716529 | 0.070131 | 10.21701 | 0.0000 |
| X2 | 0.117619 | 0.033855 | 3.474173 | 0.0006 |
| X3 | 0.038983 | 0.015661 | 7.475054 | 0.0000 |
| X4 | -0.010425 | 0.009359 | -1.113817 | 0.2668 |

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.948938 | Mean dependent var | 0.519583 |
| Adjusted R-squared | 0.940482 | S.D. dependent var | 0.432939 |
| S.E. of regression | 0.259048 | Akaike info criterion | 0.196856 |
| Sum squared resid | 12.07907 | Schwarz criterion | 0.400449 |
| Log likelihood | -6.898166 | Hannan-Quinn criter. | 0.279313 |
| F-statistic | 32.13548 | Durbin-Watson stat | 2.314560 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber : Diolah dengan Eviews 9

$$Y = -5.138758 + 0.716529X1 + 0.117619X2 + 0.038983X3 - 0.010425X4 + \mu it$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Melalui perhitungan regresi linier berganda terlihat dari nilai Adjusted R Square dengan nilai sebesar 0.940482 atau 94% yang memiliki arti Indeks

pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama mampu memberikan variasi penjelasan terhadap Ketimpangan Pendapatan sebesar 94%, sedangkan 6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam estimasi model regresi.

Uji Simultan (uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan taraf signifikansi α (5%), $(df1) = k-1 = 4-1=3$ dan $(df2) = n-k = 184-4=180$, Nilai F tabel sebesar 2.65 sedangkan nilai F hitung sebesar 32.13548. Dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $32.13548 > 2.65$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Pembahasan

Indeks Entrophy Theil

Berdasarkan hasil analisis Indeks Entrophy Theil di tiap kecamatan di Kabupaten Bekasi tahun 2010-2017 menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai Indeks Entrophy Theil terbesar berada di kecamatan Cikarang

Barat. Sedangkan nilai Indeks Entrophy Theil terkecil berada di kecamatan Tambun Utara. Jika dilihat berdasarkan Nilai Indeks Entrophy Theil tersebut menunjukkan bahwa di Tiap Kecamatan Kabupaten Bekasi disrtibusi pendapatannya relatif tidak merata, terutama di kecamatan yang berada di Wilayah Pembangunan III yang memiliki Indeks yang sangat besar seperti Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, dan Cikarang Selatan.

Ketimpangan ini disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah yang berbeda tiap kecamatan, jumlah penduduk dan PDRB Per Kapita yang berbeda, alokasi investasi yang tidak merata, kenaikan upah minimum kabupaten tiap tahun serta tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah yang berbeda sehingga yang menikmati hasil hanya sebagian.

Hal ini bertentangan dengan penelitian Putra (2014) yang mengatakan bahwa adanya ketimpangan yang cenderung menurun antar kecamatan di Kabupaten Bekasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan PDRB perkapita yang tinggi sebanding dengan tingkat pemerataan ekonomi setiap daerah. Sedangkan Berdasarkan Indeks Jaime Bonet di Kabupaten Bekasi terdapat tiga kecamatan seperti (1) Kecamatan Cibitung, Cikarang Utara dan Cikarang Selatan termasuk daerah yang memiliki PDRB

kapita tinggi dan ketimpangan tinggi, (2) sedangkan Kecamatan Tambun Selatan termasuk daerah yang memiliki PDRB kapita tinggi namun ketimpangan rendah, (3) sedangkan kecamatan yang lain seperti Kecamatan Cikarang Barat, Sukatani, Cabangbungin, Karangbahagia, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Bojongmangu, Tarumajaya, Babelan, Sukawangi, Sukakarya, Tambun Utara, Tambelang, Pebayuran, Setu, Serang Baru, Cubarusah, Muara Gembong termasuk daerah yang memiliki PDRB kapita rendah dan ketimpangan rendah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien 0,72 yaitu, apabila Indeks Pembangunan Manusia Naik 1% maka Ketimpangan Pendapatan akan Turun sebesar 72%. Sedangkan berdasarkan uji parsial diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki t hitung sebesar 10.21701 lebih tinggi dari ttabel sebesar 1.65336 yang artinya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berpengaruhnya IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bekasi ini disebabkan Peningkatan nilai IPM di Kabupaten Bekasi yang terus terjadi setiap

tahun. Hal ini disebabkan karena pemerintah tersebut menjalankan beberapa upaya dan antisipasi yang mengarah kepada program penyediaan lapangan kerja serta juga pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan seperti Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai standar hidup yang layak terutama dalam pemenuhan kebutuhan papan (perumahan) dengan memberikan bantuan dana maupun bahan dan peralatan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni. Meskipun meningkat secara statistik peningkatan IPM itu hanya terjadi di beberapa wilayah saja terutama di daerah Wilayah Pembangunan III dan belum menyebar ke daerah yang lain, selain itu faktor Urbanisasi dan Iklim investasi yang kondusif membuat IPM tersebut terus meningkat yang berdampak pada tingkat pendidikan masyarakat khususnya masyarakat lokal yang terkena dampak tersebut yang notabene masih rendah di Kabupaten Bekasi berakibat berpengaruh pada minimnya penyerapan tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Pradnyadewi dan

Purbadharmaja (2016) mengatakan IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Suatu keadaan yang baik apabila suatu daerah Indeks Pembangunan Manusia nya meningkat maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Secara umum IPM yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relative tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah dan ada daerah yang maju akibat kualitas manusianya yang baik.

Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien 0,12 yaitu, apabila Inflasi Turun 1% maka Ketimpangan Pendapatan akan Turun sebesar 12%. Sedangkan berdasarkan uji parsial diketahui bahwa Inflasi memiliki t hitung sebesar 3.474173 lebih tinggi dari t tabel sebesar 1.65336 yang artinya Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berpengaruhnya Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Bekasi ini disebabkan karena Inflasi yang terjadi di Kabupaten Bekasi dikarenakan kenaikan upah minimum kabupaten yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga meningkatnya pula harga bahan pokok di

pasar ditambah dengan beban biaya distribusi barang di setiap pasar yang berbeda di tiap tempat dan kurangnya jumlah produksi bahan pokok yang berakibat tidak mampu memenuhi permintaan pasar untuk memenuhi stok terpaksa harus mengambil dari daerah lain, sehingga harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Selain itu kenaikan daya beli masyarakat yang juga meningkatkan gaya hidup para masyarakat dapat mempengaruhi inflasi misalnya untuk kebutuhan pangan lebih cenderung membeli makanan siap saji, kebutuhan rekreasi misal lebih menyukai menonton film dan bermain di area permainan di pusat perbelanjaan dan kenaikan kebutuhan transportasi terutama meningkatnya kendaraan pribadi seperti sepeda motor.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Hakim (2018) yang mengatakan bahwa Inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap adanya ketimpangan pendapatan di kelima negara berkembang di ASEAN. Peningkatan inflasi pada kelima negara berkembang ASEAN akan mengurangi daya beli masyarakat di beberapa golongan sehingga menurunnya angka permintaan barang dan jasa, maka produsen harus mengurangi pekerja, dan meningkatnya angka pengangguran serta kesenjangan pendapatan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien 0,039 yaitu, apabila Pertumbuhan Ekonomi Naik 1% maka Ketimpangan Pendapatan akan Turun sebesar 0,39%. Sedangkan berdasarkan uji parsial diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki thitung sebesar 7.475054 lebih tinggi dari ttabel sebesar 1.65336 yang artinya Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berpengaruhnya Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Bekasi ini disebabkan karena Dari tahun-ketahun, Kabupaten Bekasi berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya, salah satunya dengan membuka banyak lahan untuk Perusahaan dan pembangunan khususnya industri, perumahan dan jasa serta dengan meningkatkan kualitas Pertanian terkhusus dibidang Pertanian Padi yang dimana lebih banyak petani Padi dibanding petani perkebunan lainnya di daerah ini. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa dirasakan oleh daerah tertentu dan masyarakat tertentu, hal ini disebabkan hanya bertumpu di daerah Wilayah Pembangunan III yang notabene adalah daerah industri, perumahan dan jasa dan

hanya bisa dirasakan oleh orang tertentu saja tidak semua masyarakat menikmatinya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Marbun (2018) yang mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Sumatera Utara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin besar pula pendapatan per kapita dan akan menyebabkan semakin lebar kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Hal ini mengindikasikan adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh Negatif terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien -0.01 yaitu, apabila Tingkat Kemiskinan Turun 1% maka Ketimpangan Pendapatan akan Turun sebesar 0.1%. Sedangkan berdasarkan uji parsial diketahui bahwa Tingkat Kemiskinan memiliki thitung sebesar -1.113817 lebih rendah dari ttabel sebesar 1.65336 yang artinya Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Tidak Berpengaruhnya Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Bekasi ini disebabkan karena kemiskinan terjadi di

beberapa daerah saja terutama di daerah pinggiran kabupaten. Hal ini disebabkan karena hanya fokus mengembangkan wilayah Cikarang dan wilayah industri di Kabupaten Bekasi, sehingga daerah pinggiran Kabupaten Bekasi lainnya, menjadi tertinggal. Tingginya Angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi terjadi di sebagian besar daerah Pinggiran yang tidak tersentuh pembangunannya oleh pemerintah dimana Anggaran Pendapatan yang sangat besar namun tidak diimbangi dengan kebijakan pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat, mengakibatkan pembangunan di wilayah beksi tidak berimbang dan merata, sehingga indeks tingkat kualitas pendidikan masyarakat kabupaten Bekasi rendah, pemberdayaan manusia yang minim, perekonomian yang terpuruk, diperparah dengan mengambil kebijakan yang bersifat politis sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi meningkat.

Hal ini sesuai dengan penelitian Andiny dan Mandasari (2017) yang mengatakan bahwa Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Aceh dikarenakan Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh lebih di pengaruhi oleh faktor- faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap

Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis variabel IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Saputro (2018) yang mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika inflasi meningkat berdampak pada rendahnya Pertumbuhan Ekonomi yang di sebabkan Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah rendah, sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan yang berakibat pendapatan masyarakat akan semakin timpang.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan analisa data dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil perhitungan diatas rata-rata Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Bekasi sepanjang 2010-2017 masih cukup timpang dibanding daerah lain. Sedangkan kecamatan yang memiliki pendapatan yang paling timpang ialah Kecamatan Cikarang Barat dan kecamatan yang memiliki pendapatan yang hampir merata ialah Kecamatan Tambun Utara.

2. Indeks Pembangunan Manusia, memiliki nilai parsial positif dan signifikan yang artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Inflasi, memiliki nilai parsial positif dan signifikan yang artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
4. Pertumbuhan Ekonomi, memiliki nilai parsial positif dan signifikan yang artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
5. Tingkat Kemiskinan memiliki nilai parsial negatif dan tidak signifikan yang artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
6. Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi implikasi. Adapun implikasi yang bisa dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan harus diatasi dengan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi agar kesejahteraan masyarakat tersebut meningkat sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan.
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia salah satunya adalah dengan cara mengoptimalkan sarana pendidikan dan keahlian dikarenakan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal selain itu peningkatan akses kesehatan seperti memperbanyak rumah sakit dan pengomptimalan Jamkesda.
3. Inflasi ditekan dengan cara pengendalian harga kebutuhan pokok agar tidak harga tersebut terkendali selain itu perubahan gaya hidup masyarakat terutama di daerah industri dan perkotaan untuk lebih menguraangi pengeluaran yang bersifat konsumtif.
4. Pertumbuhan ekonomi haruslah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dimana selama ini pertumbuhan hanya bisa dinikmati sebagian kecil saja, maka dari itu pertumbuhan tersebut harus bisa membuat kesejahteraan masyarakat bertambah selain itu pengoptimalan dan revitalisasi pasar tradisional daerah serta peongoptimalan dan meningkatkan hasil pertanian dan kelautan juga salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut.
5. Tingkat kemiskinan harus ditekan dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan rakyat menengah seperti peningkatan keahlian masyarakat sehingga dapat mencetak lebih banyak wirausahawan baru dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta memberikan

perlindungan bagi para pekerja di sektor informal seperti petani, buruh tani, nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *JENSI (Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi)*, 1(2), 196-210.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2015. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2015*. Bekasi : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2016. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2016*. Bekasi : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2017. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2017*. Bekasi : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2018. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018*. Bekasi : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2015. *Statistik Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018*. Bekasi : Badan Pusat Statistik.
- Basuki, Agus Tri, dan Imamudin Yuliadi. 2015. *Elektronik Data Prosessing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Yogyakarta: Danisa Media
- Basuki, Agus Tri, dan Nano Prawoto. 2017. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok:PT Rajagrafindo Persada.
- Hakim, F. Z. (2018). Analisis pengaruh total populasi, inflasi, IPM, dan Corruption Perception Index (CPI) terhadap ketimpangan pendapatan pada Tahun 2010–2015 *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Kuncoro, Mudrajad., 2004. *Otonomi & pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory, 2000. *Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Marbun, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan penyaluran dana zakat terhadap kesenjangan pendapatan di Sumatera Utara periode 2011-2017 *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.
- Putra, Frengky Parama. Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarkecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2011. *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada.
- Pradnyadewi, D. T., & Purbadharmaja, I. B. P. (2016). Pengaruh IPM, biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Universitas Udayana, 6(2), 255-285.

Saputro, A. T. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suryawati, Chriswardani, 2005, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tambunan, Tulus., 2001. *Perekonomian Indonesia: teori dan temuan empiris*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

UNDP. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.